

**KEBIJAKAN KEGIATAN TMMD (KETERPADUAN ANTARA TNI DAN PEMDA
DALAM RANGKA SISHANKAMRATA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT) DI
KOTA PADANG**

SYAMSIR¹, ALDRI FRINALDI², ALAHAN SINAGA³, BOBI RIZKI ANANDA⁴

Universitas Negeri Padang^{1,2,3}, STISIP Imam Bonjol⁴

E-mail: Alahansinaga01@gmail.com³

Abstrak: Kebijakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program yang bertujuan untuk membangun daerah tertinggal atau terisolir di Indonesia. Program ini merupakan keterpaduan antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam rangka Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program TMMD dalam konteks Sishankamrata, antara lain masalah koordinasi, pemilihan sasaran, konflik, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara TNI dan Pemerintah Daerah, serta pemerataan pembangunan yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah yang berbeda-beda. Partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan program TMMD dalam mencapai tujuan Sishankamrata. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program TMMD untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan Sishankamrata.

A. Pendahuluan

Sebuah pertanyaan penting untuk dikemukakan, masihkah TMMD punya nilai manfaat disaat negara ini sudah memasuki era baru yang dinamakan reformasi dalam membangun hubungan komunikasi yang sehat antara rakyat dengan TNI? Potret buram tentang masih adanya kondisi wilayah yang secara ideal belum tersentuh pembangunan dalam memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan, merupakan salah satu cermin kegagalan negara dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Argumentasi penyebab kegagalan itu, tentu banyak sebab yang bisa dicari, namun adalah kurang pas kalau hanya malah saling tuding menuding, dengan prasangka positif dapat dikatakan bahwa negara dalam satu sisi memang banyak mengalami keterbatasan baik dari segi pembiayaan pembangunan maupun alat peralatan yang minim. Dalam mengejar sebuah ketertinggalan itu, tentu butuh kesadaran dan partisipasi semua komponen bangsa untuk saling bahu membahu membantu tugas negara dan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

TNI sebagai bagian dari elemen bangsa yang mempunyai fungsi khusus sebagai alat pertahanan dalam Undang-Undang no. 34 tahun 2005 tentang TNI, menyebutkan dua pola operasi pokok TNI, yakni operasi perang dan operasi selain perang yang terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan. Keterlibatan TNI dalam bentuk partisipasi aktif terhadap sensitifitas persoalan masyarakat yang dikemas dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) dan lain sebagainya secara hukum memang telah dipayungi, namun lebih dari itu sebenarnya TNI tidak boleh tinggal diam terhadap persoalan masyarakat padahal dengan segenap kemampuan yang dipunyai, TNI bisa memberikan kontribusi positif dalam membantu persoalan masyarakat.

Bagaimanapun TNI tidak boleh mengingkari proses kelahirannya yang lahir dari rakyat dan dibesarkan oleh rakyat, artinya apa yang dilakukan TNI harus berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dalam visi dan misi TNI keprofesionalan TNI dalam melakukan tugas pokoknya harus terbangun spirit untuk dicintai dan mencintai rakyatnya.

Menjawab pertanyaan yang dikemukakan diawal, sepanjang kami ketahui berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun oleh Staff Territorial Kodam I/BB baik melalui internal TNI atau pemantauan lewat media cetak dan elektronik, termasuk proses interaksi

yang kami lakukan, sampai saat ini belum ada satupun kesan negatif terhadap digelarnya TMMD. Kekhawatiran memang sempat terlintas, semenjak adanya wacana tuntutan teritorial TNI digugat oleh sebagian elemen masyarakat pasca lahirnya reformasi 1998, beragam kegiatan bidang teritorial yang telah dirancang dan direncanakan tentu akan terganggu, namun itu tidak sampai terjadi sampai saat ini.

Terkait dengan kegiatan TMMD hingga kini, belum bisa memberi gambaran bahwa, TMMD masih dapat dijadikan bentuk pola komunikasi yang sehat dalam membangun kemandirian TNI dengan rakyat. Sudah beragam bentuk proyek yang telah dilakukan TNI, bahkan yang mengembirakan, ungkapan terima kasih dan permintaan dari warga agar wilayahnya dijadikan sasaran proyek TMMD terus bertambah tiap waktu. Walaupun ini belum bisa dijadikan indikator sepenuhnya, terhadap keberhasilan kegiatan teritorial TNI, sebenarnya ini sudah memberi gambaran, TMMD tidak memunculkan persinggungan yang merugikan bagi rakyat dan TNI yang oleh sebagian kalangan yang antipati dengan TNI, seolah-olah dianggap sebagai upaya politisasi masyarakat untuk kepentingan tertentu.

Kalau misalnya memang ada, tentu secara fair dikatakan ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang berkembang saat itu, namun sejalan dengan proses perjalanan bangsa, TNI tentu dapat memahami kekhawatiran rakyat dan dapat mengambil hikmah. Sejalan dengan itu, TNI pun melakukan reformasi internal dan saat ini TNI sudah punya payung hukum mengatur tentang dirinya yakni UU nomor 34 tahun 2004, kemudian dapat dikatakan TMMD adalah bagian dari fungsi TNI dalam tugas operasi selain perang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Korem 032/Wbr , Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat serta mengungkapkan kebijakan kegiatan TMMD yang diambil oleh TNI dalam rangka mewujudkan sishankamrata untuk kesejahteraan rakyat Metode kualitatif ini digunakan mengingat beberapa pertimbangan, Pertama, metode kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada aktor-aktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut, kedua, metode kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas social dan saling berpengaruh antar realitas sosial, ketiga, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor, keempat, penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya ketimbang metode kuantitatif dan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial. informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini didasarkan kepada penilaian peneliti tentang mana yang paling bermanfaat. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) merupakan program kerja sama antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membangun desa-desa di Indonesia. Program ini merupakan bentuk keterpaduan antara TNI dan Pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional.

Dalam pelaksanaannya, TMMD melibatkan berbagai unsur seperti anggota TNI, Pemda, masyarakat, serta instansi lainnya. Kegiatan yang dilakukan dalam program TMMD antara lain pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

selain itu, TMMD juga melibatkan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, TMMD menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan desa yang lebih baik

Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) merupakan sistem pertahanan dan keamanan yang berfokus pada upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sishankamrata, TNI berperan sebagai kekuatan pertahanan negara yang tidak hanya melindungi negara dari ancaman luar, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) merupakan sistem pertahanan dan keamanan yang berfokus pada upaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sishankamrata, TNI berperan sebagai kekuatan pertahanan negara yang tidak hanya melindungi negara dari ancaman luar, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TNI dalam pelaksanaan Sishankamrata melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional melalui operasi militer yang bersifat preventif atau reaktif terhadap ancaman luar dan dalam.
2. Melakukan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat.
3. Membantu pembangunan nasional melalui program-program pembangunan yang melibatkan TNI dalam bentuk keterpaduan antara TNI dan Pemerintah Daerah (TMMD).
4. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam bidang-bidang tertentu, seperti pertanian, kesehatan, dan keamanan.

Dengan demikian, Sishankamrata tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga memperhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional dan pembinaan masyarakat.

TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) merupakan program yang dilaksanakan oleh TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka membangun daerah tertinggal atau terisolir di Indonesia. Program TMMD ini sejalan dengan konsep Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) yang menekankan pentingnya membangun kesejahteraan rakyat sebagai salah satu bentuk pertahanan negara.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program TMMD dalam konteks Sishankamrata, antara lain:

1. Masalah koordinasi: Keterpaduan antara TNI dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TMMD belum selalu berjalan dengan baik, terutama dalam hal koordinasi antara pihak TNI dan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program TMMD dan dampaknya terhadap Sishankamrata.
2. Masalah pemilihan sasaran: Dalam pelaksanaan TMMD, terkadang terjadi masalah dalam pemilihan sasaran program. Terdapat daerah-daerah yang dianggap perlu untuk ditingkatkan kesejahteraannya, namun diabaikan dalam program TMMD, dan sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas program dan menciptakan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan.
3. Masalah konflik: Terkadang, pelaksanaan program TMMD dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak TNI atau Pemerintah Daerah. Hal ini terutama terjadi ketika program TMMD dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan masyarakat setempat. Konflik ini dapat mengganggu keamanan dan stabilitas daerah, yang bertentangan dengan tujuan Sishankamrata.
4. Masalah keberlanjutan: Program TMMD dianggap kurang berkelanjutan karena setelah program selesai, kondisi daerah yang dituju kembali seperti semula. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dan dukungan dari pihak pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh program TMMD.

Dalam rangka menjaga keterpaduan antara TMMD dengan Sishankamrata, diperlukan koordinasi yang baik antara TNI dan Pemerintah Daerah, serta pemerataan pembangunan yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah yang berbeda-beda. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan yang

berkelanjutan juga sangat penting untuk menjamin keberhasilan program TMMD dalam mencapai tujuan Sishankamrata.

Dalam konteks teori kebijakan kegiatan, penting bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam lingkungan dimana kebijakan atau kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan atau kegiatan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Teori kebijakan kegiatan mencakup empat elemen utama, yaitu:

1. Masalah: kebijakan atau kegiatan harus berfokus pada masalah atau isu yang ingin diatasi atau diselesaikan. Identifikasi masalah yang tepat sangat penting agar kebijakan atau kegiatan dapat efektif dalam mencapai tujuannya
2. Tujuan: kebijakan atau kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang spesifik memungkinkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau kegiatan.
3. Strategi: kebijakan atau kegiatan harus memiliki strategi yang efektif dalam mencapai tujuannya. Strategi yang efektif harus memperhitungkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di lingkungan dimana kebijakan atau kegiatan dilaksanakan.
4. Evaluasi: kebijakan atau kegiatan harus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai dan untuk memperbaiki kebijakan atau kegiatan yang tidak efektif. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan harus dilakukan secara obyektif dan independen.

D. Penutup

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah program kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh kedaulatan negara melalui pembangunan fisik dan non-fisik di pedesaan.

Beberapa kebijakan kegiatan TMMD antara lain:

1. Penentuan lokasi kegiatan TMMD dilakukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat, serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat setempat.
3. Pelaksanaan kegiatan diawasi oleh tim pengawas dari Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
4. Kegiatan TMMD dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan agar masyarakat dapat mandiri dalam mengembangkan potensi desanya.
5. Kegiatan TMMD juga mengutamakan pelestarian lingkungan, dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan kegiatan TMMD dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di setiap daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI di Provinsi Sumatera Barat yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data, wawancara demi kelancaran tugas dan permasalahan kebijakan TMMD di lapangan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pertahanan RI. 2019. Pedoman Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. Panduan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. Jakarta.

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2017. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh TNI di Wilayah Terpencil dan Tertinggal. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2016. Panduan Peningkatan Kualitas Hidup Desa Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. 2015. Pedoman Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan. Jakarta